



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 20 Maret 2019/Periodik - 2018)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA YOGYAKARTA
SUB UNIT KERJA : PENGADILAN AGAMA WATES

I. DATA PRIBADI

1. Nama : KHOIRIL BASYAR
2. Jabatan : PANITERA MUDA PERKARA PERMOHONAN
3. NHK : 419645

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 155.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m²/130 m² di KULON PROGO,
HIBAH TANPA AKTA Rp. 155.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 210.500.000

1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR SOLO Tahun 2016, HASIL
SENDIRI Rp. 11.500.000
2. MOTOR, SUZUKI FD 125 X SD Tahun 2004, HASIL SENDIRI Rp.
3.000.000
3. MOTOR, HONDA ND 11VF1CB A/T Tahun 2013, HASIL SENDIRI
Rp. 6.000.000
4. MOTOR, HONDA NF 1181DMT Tahun 2010, HIBAH TANPA AKTA
Rp. 5.000.000
5. MOBIL, SUZUKI AV11414FSDX(AZX) MT/MINI BUS Tahun 2017,
HASIL SENDIRI Rp. 185.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 25.500.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 1.993.355

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 392.993.355

III. HUTANG Rp. 135.255.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 257.738.355

Catatan:



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **26 Juni 2019**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.